



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMMAD ZAINAL FATAH**
2. Jabatan : **SEKRETARIS JENDERAL**
3. NHK : **250837**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **2.134.167.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/150 m² di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 384.560.000
2. Tanah Seluas 329 m² di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 517.517.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/70 m² di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 365.800.000
4. Tanah Seluas 180 m² di KEDIRI, WARISAN Rp. 10.800.000
5. Tanah Seluas 791 m² di KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 94.920.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m²/66 m² di PAMEKASAN, HASIL SENDIRI Rp. 76.000.000
7. Tanah Seluas 4525 m² di KEDIRI, WARISAN Rp. 226.250.000
8. Tanah Seluas 4460 m² di KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 267.600.000
9. Tanah Seluas 1192 m² di KEDIRI, WARISAN Rp. 190.720.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **131.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, FORD ECOSPORT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 128.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **209.850.340****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **1.428.515.938****F. HARTA LAINNYA** Rp. **20.000.000**



Sub Total	Rp.	3.923.533.278
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.923.533.278

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.